

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Salah satu indikator penting dalam menilai kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku (Undang-Undang Nomor 33, 2004).

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan (Sulistiawati dkk., 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber PAD yang potensial, salah satunya melalui pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan

yang relatif stabil dan berkelanjutan serta mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah (Sabyan & Wiarta, 2024).

Di antara berbagai jenis pajak daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan dua jenis pajak yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan PBB-P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Kedua pajak tersebut memiliki potensi penerimaan yang besar karena berkaitan langsung dengan perkembangan sektor properti dan aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah (Febrianti dkk., 2024).

Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga ibu kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam sektor properti, perumahan, serta pembangunan kawasan permukiman dan pusat bisnis. Perkembangan tersebut menyebabkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan serta bertambahnya objek pajak yang berpotensi meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB-P2. Dengan kondisi tersebut, BPHTB dan PBB-P2 menjadi sumber penerimaan yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Pengelolaan kedua jenis pajak tersebut berada di bawah tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi sebagai instansi yang berwenang dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah (Saputri & Nuryati, 2020).

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang mulai terjadi pada tahun 2020 turut memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah di

berbagai wilayah, termasuk Kota Bekasi (Wicaksono dkk., 2022). Pembatasan aktivitas masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, serta berkurangnya transaksi usaha menyebabkan realisasi beberapa jenis pajak daerah mengalami penurunan (Rozi Yamali, 2020). Selain memengaruhi pajak sektor jasa seperti hotel, restoran, hiburan, dan parkir, pandemi juga berdampak terhadap sektor properti sehingga transaksi jual beli tanah dan bangunan menurun (Setyaningsih, 2021). Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan BPHTB serta memengaruhi capaian penerimaan pajak daerah secara keseluruhan (Pinatih, 2024). Meskipun kondisi perekonomian mulai pulih setelah pandemi, proses pemulihan penerimaan pajak daerah tidak berlangsung secara instan (Cheisviyanny, 2020) sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menyusun strategi pengelolaan pajak yang lebih adaptif dan efektif.

Di sisi lain, Kota Bekasi masih memiliki potensi penerimaan BPHTB dan PBB-P2 yang besar seiring dengan terus berkembangnya sektor properti dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan dan bangunan. Potensi tersebut perlu didukung oleh strategi kebijakan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian target dan realisasi penerimaan, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi serta faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Hua dkk., 2025). Dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 di Kota Bekasi, diperlukan suatu analisis yang dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran. Salah satu

pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis SWOT yang berfungsi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan pajak daerah sehingga strategi yang dihasilkan dapat mendukung peningkatan kontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan (Ramadhan, 2025a).

Meskipun BPHTB dan PBB-P2 memiliki potensi yang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dalam praktiknya pengelolaan kedua pajak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum optimalnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah yang besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Alghifari, 2022).

Fenomena tersebut juga terlihat pada kondisi pengelolaan pajak daerah di wilayah Bekasi. Berdasarkan pemberitaan media, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menyampaikan bahwa realisasi penerimaan BPHTB hingga menjelang akhir tahun 2024 baru mencapai sekitar 53% dari target, sedangkan realisasi penerimaan PBB-P2 masih berada pada kisaran 71% dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh minimnya transaksi jual beli properti, kebijakan relaksasi pajak, serta permasalahan data objek pajak yang belum sepenuhnya diperbarui sejak pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada tahun 2013 (Galih, 2024).

Dalam sistem pengelolaan pajak daerah di Kota Bekasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai jenis pajak sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mengelola sembilan jenis pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bekasi selama periode 2019–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2019–2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pajak Daerah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel	33,213.91	24,405.73	3,214.48	35,785.66	39,453.09	4,140.94
2	Restoran	329,659.40	227,552.50	26,196.64	362,398.44	411,463.44	40,609.94
3	Hiburan	52,546.60	24,495.23	2,290.59	44,073.47	53,040.57	3,640.73
4	Reklame	48,624.87	63,304.69	7,734.85	73,363.63	73,021.06	8,263.08
5	PPJ	311,795.04	352,436.80	31,346.26	378,656.30	405,619.02	39,064.54
6	Parkir	44,433.52	28,492.89	2,587.02	37,208.61	43,897.28	1,780.65
7	Air Tanah	7,504.47	5,270.88	605.13	4,613.96	4,044.49	567.63
8	PBB-P2	481,729.06	434,325.89	17,954.72	464,614.30	469,231.19	17,472.49
9	BPHTB	467,554.23	397,277.77	90,225.04	612,164.94	639,161.21	64,772.47
JUMLAH		1,777,061.11	1,557,562.37	182,154.73	2,012,879.32	2,138,931.35	180,312.46

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2026 (data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Bekasi selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 total realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp1.777.061.108.702,00. Tingginya realisasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah, khususnya BPHTB dan PBB-P2, memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi (Mahmudi, 2019).

Namun, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp1.557.562.367.133,00. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan melemahnya aktivitas ekonomi, penurunan transaksi usaha, serta berkurangnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor (Riyanto & Mudara, 2021). Dampak pandemi menyebabkan beberapa jenis

pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir mengalami penurunan penerimaan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan penurunan mobilitas selama masa pandemi (Muhammad & Saputro, 2021). Selain itu, kondisi pandemi juga mempengaruhi transaksi jual beli properti yang berdampak terhadap penerimaan BPHTB.

Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak daerah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.715.963.810.423,00. Peningkatan tersebut menunjukkan mulai membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya kembali penerimaan BPHTB dan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama PAD Kota Bekasi (Mardiasmo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa sektor properti masih menjadi sektor yang potensial dalam mendukung penerimaan pajak daerah Kota Bekasi.

Tabel 1.2
Target Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pajak Daerah	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel	50,737.28	25,219.11	23,319.69	45,389.06	56,736.33	44,406.22
2	Restoran	345,410.18	259,205.29	309,868.62	441,937.54	519,978.17	504,664.14
3	Hiburan	78,224.18	42,292.46	19,274.87	68,058.88	78,267.71	62,650.43
4	Reklame	131,950.80	46,700.00	63,271.04	74,534.52	87,181.00	78,376.16
5	PPJ	493,191.13	350,000.00	340,817.14	428,275.77	386,119.16	425,214.48
6	Parkir	140,000.00	45,000.00	32,661.99	58,356.98	64,192.68	20,026.92
7	Air Tanah	16,100.50	4,544.10	5,365.06	10,088.64	12,000.00	3,732.41
8	PBB-P2	599,732.91	420,000.00	579,533.41	553,886.44	661,942.90	661,942.90
9	BPHTB	440,31.04	392,976.71	467,575.12	516,330.24	587,714.01	898,777.59
JUMLAH		2,295,657.75	1,585,937.67	1,841,686.98	2,196,858.08	2,454,131.96	2,699,791.24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Kota Bekasi, 2026 (data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target pajak daerah Kota Bekasi selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 total target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp2.295.657.756,75. Tingginya target tersebut menunjukkan besarnya potensi pajak daerah Kota Bekasi, terutama

dari sektor properti melalui BPHTB dan PBB-P2 yang menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian pada tahun 2020 target pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp1.585.937.678,85. Penurunan target terjadi pada beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan PBB-P2. Meskipun demikian, BPHTB dan PBB-P2 tetap menjadi jenis pajak dengan target penerimaan terbesar dibandingkan pajak daerah lainnya. Selanjutnya pada tahun 2021 target pajak daerah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1.841.686.983,39. Peningkatan tersebut terlihat pada target penerimaan BPHTB dan PBB-P2 yang menunjukkan bahwa sektor properti masih menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang potensial dalam meningkatkan PAD Kota Bekasi.

Dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi, BPHTB dan PBB-P2 merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Tingginya penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut menunjukkan bahwa sektor properti dan kepemilikan tanah serta bangunan memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Selain itu, perkembangan penerimaan kedua jenis pajak tersebut juga mencerminkan kondisi aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor properti. Meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan serta bertambahnya objek pajak baru akan berdampak pada peningkatan penerimaan BPHTB dan PBB-P2. Sebaliknya, apabila aktivitas sektor properti mengalami perlambatan, maka penerimaan kedua jenis pajak tersebut juga berpotensi mengalami penurunan. Adapun gambaran mengenai total pertumbuhan dan rata-

rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Bekasi pada periode 2019–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bekasi Tahun 2019-2024

No	Pajak Daerah	Tahun						Total Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Hotel	2%	2%	2%	2%	2%	2%	12%	2%
2	Restoran	19%	15%	14%	18%	19%	23%	108%	18%
3	Hiburan	3%	2%	1%	2%	2%	2%	12%	2%
4	Reklame	3%	4%	4%	4%	3%	5%	23%	4%
5	PPJ	18%	23%	17%	19%	19%	22%	118%	20%
6	Parkir	3%	2%	1%	2%	2%	1%	11%	2%
7	Air Tanah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	PBB P2	27%	28%	10%	23%	22%	10%	110%	18%
9	BPHTB	26%	26%	50%	30%	30%	36%	198%	33%
JUMLAH		100%	100%	100%	100%	100%	100%	600%	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Kota Bekasi, 2026 (data diolah kembali)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Bekasi selama periode 2019–2024 masih didominasi oleh pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan data tersebut, rata-rata kontribusi BPHTB mencapai 33%, sedangkan PBB-P2 sebesar 18% dari total penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, kedua jenis pajak tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 51% terhadap total penerimaan pajak daerah.

Tingginya kontribusi BPHTB dan PBB-P2 dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya menunjukkan bahwa struktur penerimaan pajak daerah Kota Bekasi masih sangat dipengaruhi oleh sektor properti, khususnya transaksi dan kepemilikan tanah serta bangunan. Sementara itu, pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan air tanah memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap penerimaan dari BPHTB dan PBB-P2 (Tarigan dkk., 2025), sehingga diperlukan kajian lebih

lanjut untuk mengetahui penyebab dominasi kedua pajak tersebut terhadap pendapatan pajak daerah.

Sejak kewenangan pengelolaan pajak BPHTB dialihkan kepada Pemerintah Kota Bekasi pada 1 Februari 2011 serta PBB-P2 pada 1 Januari 2013, kedua jenis pajak tersebut resmi menjadi bagian dari pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengalihan kewenangan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Bekasi dari tahun ke tahun (Saputri & Nuryati, 2020b).

Tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 dapat dianalisis dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, di mana penetapan target tersebut didasarkan pada estimasi potensi riil yang dimiliki daerah. Untuk melihat secara lebih rinci perkembangan penerimaan BPHTB dan PBB-P2 di Kota Bekasi, baik dalam bentuk persentase maupun perubahan berupa kenaikan atau penurunan, pada periode 2019-2024 dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Perkembangan Penerimaan BPHTB Dan PBB-P2 Kota Bekasi Tahun 2019-2024
(Dalam Persentase dan Selisih)

Tahun	PBB P2			BPHTB		
	Persentase Perbandingan Target dan Realisasi	Kenaikan (Penurunan)		Persentase Perbandingan Target dan Realistis	Kenaikan (Penurunan)	
2019	80%	Rp	118,003,855,137	106%	-Rp	27,244,189,333
2020	103%	-Rp	14,325,888,805	101%	-Rp	4,301,052,730
2021	77%	Rp	561,578,693,199	107%	Rp	377,350,083,774
2022	83%	Rp	89,272,142,975	118%	-Rp	95,834,701,443
2023	70%	Rp	192,711,711,355	108%	-Rp	51,447,201,748
2024	71%	Rp	644,470,411,241	56%	Rp	834,005,125,953

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Kota Bekasi, 2026 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2022-2023, realisasi penerimaan PBB-P2 tidak melampaui 100% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan penerimaan BPHTB pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan, capaian kinerjanya hanya 56%. Ketidaktercapaian target penerimaan BPHTB dan PBB-P2 dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemungutan kedua pajak tersebut di Kota Bekasi belum sepenuhnya optimal, sehingga realisasi penerimaannya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh penetapan target yang relatif tinggi dan belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi riil dari sektor BPHTB dan PBB-P2 pada tahun berjalan. Oleh karena itu, ketidaktercapaian target penerimaan BPHTB dan PBB-P2 juga dapat menjadi indikasi perlunya evaluasi terhadap metode penetapan target maupun terhadap efektivitas pengelolaan dan pemungutan pajak daerah di Kota Bekasi (Candra, 2024).

Meskipun demikian, BPHTB dan PBB-P2 tetap menjadi penyumbang utama dalam penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah target maupun realisasi penerimaan yang telah ditetapkan selama ini sudah mencerminkan potensi riil dari sektor BPHTB dan PBB-P2 di Kota Bekasi. Selain itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait perumusan strategi kebijakan yang tepat dalam meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPHTB dan PBB-P2 secara berkelanjutan. Melalui pendekatan analisis SWOT, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak daerah di

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, sehingga dapat dirumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan hasil yang beragam. Selain itu, terdapat beberapa studi terdahulu yang telah menggunakan analisis SWOT sebagai alat untuk merumuskan strategi kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran efektivitas dan kontribusi untuk menilai kinerja penerimaan BPHTB dan PBB-P2 dan perannya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini. Meskipun penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan rasio dan kontribusi yang sama, namun kajian tersebut umumnya belum mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dengan perumusan strategi berbasis analisis SWOT secara komprehensif serta belum dilakukan secara khusus pada Kota Bekasi sehingga penelitian ini akan menjadi celah untuk mengisi kekosongan tersebut.

Oleh karena itu, berbagai fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait efektivitas dan kontribusi penerimaan BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi serta merumuskan strategi kebijakan berbasis analisis SWOT yang dapat digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPHTB dan PBB-P2 secara berkelanjutan. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi

BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2019–2024.”

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama tahun 2019-2024?
2. Bagaimana kontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama tahun 2019-2024?
3. Bagaimana strategi kebijakan berbasis analisis SWOT yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPHTB dan PBB-P2 secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan BPHTB dan PBB-P2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama tahun 2019-2024.
2. Menganalisis kontribusi BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi selama tahun 2019-2024.
3. Merumuskan strategi kebijakan berbasis analisis SWOT untuk meningkatkan kontribusi dan kinerja penerimaan BPHTB dan PBB-P2 secara berkelanjutan pada Bapenda Kota Bekasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil studi ini diharapkan mampu menambah wawasan dan

pengetahuan bagi penelitian serta dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya, mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada BAPENDA Kota Bekasi sebagai bahan masukan dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan BPHTB dan PBB-P2, agar pendapatan daerah tersebut terus meningkat melalui penggalan potensi daerah dengan menambah dan mengembangkan jenis-jenis pajak daerah yang sesuai dengan kepentingan daerah tersebut.

b. Bagi Pemerintah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan realisasi pajak daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dapat terus berkembang secara optimal.

c. Bagi Masyarakat (Umum)

Sebagai bahan informasi bagi para pembaca maupun sebagai bahan referensi atau objek penelitian yang sama, khususnya tentang efektivitas dan kontribusi BPHTB dan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kota Bekasi.